HARIAN analisa

Penerbit : PT. Media Warta Kencana
Pemimpin Umum : Supandi Kusuma
Pemimpin Perusahaan : Sujito Sukiman
Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : H. Soffyan
Wakil Pemimpin Redaksi : War Djamil
Managing Editor : Paulus M. Tjukrono
Redaktur : H. Agus Salim, Anthony Lintan, H. Herman syah, SR. Hamonangan Pangabean, Idris Pasaribu, Hendar Tusmin, Kwa Tjen Siang, Saurma, H. Ali Murthado, Sugiatmo, Gantur Adi Sukma, Tengku Kamarulzaman, Rizal Rizki Surya, Taufik Wal Hidayat, Zulmadi, Muhammad Arifin, Zulkifadi, T Anto.
Anggota Redaksi : Faisal Pardede, T. Deddy Bustamam, Irham Nasution, Ridwan, Bachtiar Adamy, Fahmi Maku, M. Abduh, Ramadan Zoko Sagala, Rhinto Sutosio, Amru Lubis, M. Ali Akbar, M. Iqbal Nasution, Hendra Irawan, Mahjijah Chair, Suhayri Ramadan, M. Syahrial Mukmin, Dina Nurbetty, Ilham Ridwan, Jaholong Situanggang, Bardanuyah, Bambang Riyanto, Dedy Gunawan, Hutajulu, Ismaini Kharisma, Nirwansyah Sukartara, Syafrita Tambunan, Yogi Yuwasta, Adelina Savitri Lubis, Eko Satria Handoko, Indah Pratiwi, Sari Ramadhani, Iron Juwita, Nur Akmal, Ahmad Nugraha Putra.
Fotografer : Feedy Siregar, M. Said Hanafiah, Junaidi Gandy, Khairil Umri Batubara, Qodrat Al-Qadri.
Terbit : Seminggu 7 kali
Tarip Iklan : Rp. 15.000,- per mm/kolom (umum)
Rp. 10.000,- per mm/kolom (kabar dukacita)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 35-49 Medan 20111
Kotak Pos : 1481, Telex No. 51326
Telepon : Redaksi : (061) 4156955 (5 saluran)
Fax. (061) 4534116.
Tata Usaha : (061) 4154711 (5 saluran), 4513554, 4524136, 4534279. Fax. (061) 4151436.
Perwakilan Jakarta : Jalan KH. Hasyim Ashari No. 43-A Jakarta Pusat, Tel. (021) 6322440, 6322271, 6322289 Fax. : (021) 6322315
SIUPP : SK. Menpen No. 02/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Desember 1985
Dicetak Oleh : PT. SURYA MAS ABADI MAKMUR
Jl. Pulau Solor KIM II Mabar - Deliserdang

Tajuk Rencana

Menelisik Dana Otsus

KASUS dugaan suap dengan menyelewengkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh 2018 yang melibatkan Gubernur Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, dan dua tersangka lainnya dari unsur swasta, masih jauh dari selesai. Penanganan kasus ini masih tahap awal meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah memiliki alat bukti yang cukup dan kuat untuk menjerat para tersangka.

Di antaranya ialah besaran komisi komitmen (commitment fee) yang harus diberikan untuk ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana Otsus Aceh. Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, menyebutkan, dana komitmen komisi ini dipotong untuk provinsi dan kabupaten untuk kemudian dibagi-bagikan kepada pihak lain. "Menurut informasi sementara dari tim penyelidik kita, memotong. Nah, itu dilakukan sekitar 10 persen. Yang 2 persen untuk tingkat kabupaten, kemudian 8 persen itu adalah untuk tingkat provinsi. Ini yang kemudian dibagi-bagi. Ke mana-mana, kita belum tahu," tuturnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Dana Otsus ini dikucurkan selama 20 tahun, mulai 2008 hingga 2027. Untuk 15 tahun pertama, besaran alokasi adalah dua persen dari dana alokasi umum (DAU) nasional. Lima tahun terakhir alokasinya menurun, menjadi satu persen dari DAU nasional. Sampai 2018, Dana Otsus yang telah dikucurkan senilai Rp65 triliun lebih. Sampai 2027, Aceh diperkirakan akan menerima Dana Otsus senilai Rp163 triliun. Khususs untuk 2018, Dana Otsus yang diterima Aceh senilai Rp8 triliun lebih.

Sejak menerima dana otsus, anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) melonjak drastis. Setiap tahun, jumlah dana otsus ini bisa mencapai lebih dari setengah dari total APBA. Contohnya adalah tahun ini. Total APBA senilai Rp15,9 triliun. Jadi, lebih dari setengah komposisi pendapatan Aceh berasal dari dana otsus.

Meski telah menjelma sebagai salah satu daerah dengan anggaran terbesar secara nasional, namun kondisi Aceh masih memprihatinkan, misalnya angka kemiskinan yang masih di atas rerata nasional. Atas keadaan ini, salah satu faktor yang patut dicermati ialah pemanfaatan dana otsus tersebut. Patut ditelisik apakah sesuai dengan amanat UU Pemerintahan Aceh atau tidak. Salah satu pintu masuk untuk mengungkapnya adalah kasus dugaan suap ini.

Dua hal layak diperhatilan dalam kasus dugaan suap ini, yaitu praktik ijon proyek dan pemberian komisi. Kedua hal ini menyiratkan bahwa pemanfaatan dana Otsus Aceh dilakukan tanpa perencanaan matang. Bahkan, kemungkinan besar mengabaikan kepentingan publik. Proyek direalisasikan hanya berdasarkan kepentingan ekonomi para pihak pengambil kebijakan. Tanpa berprasangka buruk, bukan tidak mungkin, tidak optimalnya dana Otsus Aceh dalam mengangkat perikehidupan masyarakat "Tanah Rencong" karena praktik seperti ini sudah terjadi selama bertahun-tahun.

Layak dikemukakan pula hasil kajian Pusat Pengembangan Keuangan Daerah (PPKD) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada 2015 tentang pelaksanaan dana Otsus Aceh di kabupaten/kota. Terungkap, data dasar untuk penetapan alokasi dana itu belum transparan dan tidak dipublikasikan sehingga penerimaan tidak bisa diprediksi lebih pasti. "Ketidakpastian ini dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan serta ketidaktepatan dalam memprediksi pendanaan program pada tahun berikutnya," sebut kajian tersebut.

Karenanya, kita berharap dan mendorong KPK untuk menelusuri, menelisik, dan mengungkap praktik ijon proyek sekaligus pemberian komisi ini. Apalagi, jumlahnya tidak sedikit, mencapai 10 persen dari nilai proyek. Sejujurnya, kita berharap hasilnya adalah bahwa praktik ini terjadi hanya dalam kasus ini, bukan dari sebagian besar, apalagi seluruh, proyek yang berasal dari dana otsus. Karena, betapa besar hak publik atas anggaran yang hilang bila praktik ini ternyata dalam skala yang luas.

Di luar itu, penelusuran oleh KPK ini kita harapkan juga mendari upaya menghentikan pihak pihak yang saat ini tengah mencoba menggerogoti dana Otsus Aceh tahun ini. Lebih jauh, hasil penelusurannya pun akan menjadi bagian dari lebih transparan dan bertanggung jawabnya pemanfaatan dana otsus pada masa mendatang. Sehingga, amanat UU Pemerintahan Aceh bisa tercapai secara lebih efektif dan efisien.

Guit Seli

KPU Sunut belum terima laporan gugatan.

- Siap menang dan siap kalah.

ooOoo

PEREDARAN narkoba di Sunut dinilai darurat.

- Lalu bagaimana penanganannya.

ooOoo

PEMERINTAH harus serius kenaikan dolar.

- Lho selama ini apa belum serius ya?

ooOoo

BungGuit

Rompi Orange Kepala Daerah

Oleh: Rholand Muary

Kasus Kepala daerah yang terjerat pusaran korupsi seperti tidak ada habisnya. Korupsi dan penyelenggara negara merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Kasus-kasus korupsi yang berhasil dibongkar lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan betapa kasus korupsi menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh kepala daerah dan pejabat lainnya. Keterlibatan pejabat publik dan birokrasi menjadi suatu keniscayaan, praktik korup tidak hanya dilakukan pada level pusat, namun juga menggurita dan sistemik hingga ke level bawah.

Baru-baru ini Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi harus berurusan (KPK) karena diduga memberikan suap Rp 500 juta dari *commitment fee* Rp 1,5 miliar kepada Irwandi demi mendapatkan izin proyek infrastruktur yang menggunakan alokasi dana otonomi khusus atau otsus. Sebagian dari duit suap Rp 500 juta itu diduga akan digunakan untuk kegiatan Aceh Marathon 2018.

Hal yang mengejutkan lainnya, yakni KPK juga menetapkan status tersangka kepada Calon Gubernur Maluku Utara terpilih, Ahmad Hidayat Mus yang menang Pilkada Maluku Utara tahun 2018 diduga melakukan korupsi dengan modus pengadaan proyek fiktif, yaitu pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula 2009. Saat itu, Ahmad bersatus sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula 2005-2010, dugaan kerugian negara berdasarkan penghitungan dan koordinasi dengan BPK sebesar Rp 3,4 miliar.

Sebelumnya juga ada mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola dan mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Beberapa kepala daerah dari pulau Sumatera ini merupakan contoh Kepala Daerah yang harus menggunakan "rompi orange" guna menjalani pemeriksaan di KPK.

Birokrasi Patrimonial

Menurut Djafat W (2006), analisis maraknya praktik korupsi di Indonesia lebih mengedepankan, pada pendekatan relasi Patrimonialistik dimana melahui relasi ini, para birokrat atau pejabat negara, pengusaha, penegak hukum bertemu dan membentuk jejaring korupsi, yang memberikan keuntungan bagi mereka dalam hubungan patron dan klien. Dalam konteks birokrasi, Weber. Sosiolog asal Jerman mengatakan bahwa sistem birokrasi Patrimonial, merupakan sistem dimana jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hirarki birokrasi lebih didasarkan pada hubungan *Familier*, hubungan pribadi dan hubungan "Bapak-anak buah" (*Patron Clieni*).

Budaya birokrasi ini, tidak terlepas dari warisan Orde Baru, dimana citra birokrasi dijadikan mesin politik, layanan birokrasi justru menjadi *causa prima* terhadap maraknya praktik korupsi. Pejabat politik yang mengisi birokrasi pemerintahan sangat dominan. Kondisi ini sudah cukup lama terbangun sehingga membentuk sikap, perilaku dan opini bahwa pejabat politik dan pejabat birokrasi tidak dapat dibedakan. Begitu juga dengan kebijakan desentralisasi kewenangan pemerintah ke daerah terlihat jelas dengan banyaknya kasus korupsi para pejabat politik maupun pejabat birokrasi yang diungkap oleh KPK.

Political will atau kemauan politik yang pada awalnya digadang-gadang sebagai salah satu prasyarat penting dalam pemberantasan korupsi justru dianggap sebagai jargon politik belaka, hal ini dapat dilihat dari istilah *hana fee* yang kerab dilontarkan oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang maksudnya tidak ada pungutan *fee* dalam pembangunan di Aceh. Begitu juga dengan Calon Gubernur Malut terpilih, Ahmad Hidayat Mus juga memasukkan isu anti korupsi dalam kampanyenya.

Berdasarkan data yang dilinipun melahui laman kpk.go.id bahwa pada 2017 tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 93 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 15 perkara, serta TPPU sebanyak lima perkara. Sementara, data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, mengungkapkan ada 43 perkara yang melibatkan pejabat selon I hinggga IV dan 27 perkara melibatkan swasta serta 20 perkara melibatkan anggota DPR/DPRD.

Selain itu, terdapat 12 perkara lainnya yang melibatkan bupati/walikota dan walikinya. Di antara kasus-kasus yang ditangani tersebut, terdapat 19 kasus yang merupakan hasil tangkap tangan. Jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2017 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri. Dari 19 kasus tersebut, KPK telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka dengan beragam profil tersangka, mulai dari aparat penegak hukum, anggota legislatif hingga kepala daerah. Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan kemudian dari hasil pengembangan perkara

(Bersambung ke hal. 27)

Menakar Peluang Juara Baru

Oleh: Deddy Kristian Aritonang

PIALA Dunia 2018 telah menyelesaikan fase 16 besar dan akan segera memasuki babak perempat final. Nanun, ada fenomena yang cukup menarik pada perhelatan kali ini yakni tersingkirnya tim-tim kuat, baik yang merupakan langganan juara maupun yang selalu jadi favorit untuk meraih trofi bergengsi turnamen sepak bola sejagad raya ini.

Sebelumnya, Piala Dunia kali ini sudah tampa dua tim kuat, Italia dan Belanda. Italia gagal lolos dari babak play-off. Sementara Belanda malah lebih buruk karena tidak lolos dari babak kualifikasi. Seperti yang publik sepak bola ketahui, Italia adalah negara dengan koleksi empat gelar Piala Dunia di bawah Brazil dengan lima trofi. Sementara Belanda, meski belum sekalipun merasakan juara, nyaris selalu masuk dalam bursa favorit juara karena diiuni oleh pemain-pemain bintang asal klub-klub top Eropa.

Kuburan Para Raksasa

Pada fase grup, Piala Dunia yang diseleng garakan di Rusia kali ini juga menjadi saksi tumbangnya sang juara bertahan, Jerman. Selain gagal lolos dari grup F, tim panser balikan berada di posisi buncit di bawah Korea Selatan yang dari segi peringkat FIFA dan kualitas tim jauh berada di bawah Jerman.

Di babak perdelapan final atau 16 besar dengan sistem *knockout*, Argentina, Portugal dan Spanyol menjadi tiga tim tangguh yang harus tersisih. Padahal di tiga negara ini bercokol sederet nama-nama pemain bintang yang selalu menghiasi liga-liga elit Eropa. Publikpun harus ikhlas untuk tidak lagi menyaksikan aksi-aksi pesepakbola seperti Lionel Messi, Angel Di Maria, Gonzalo Higuain, Sergio Aguero, Paulo Dybala dan Javier Mascherano dari Argentina, Cristiano Ronaldo dan Joao Moutinho dari Portugal, serta Gerard Pique, Sergio Ramos, Andres Iniesta, David Silva, Isco daan Diego Costa dari Spanyol.

Selain itu, publik juga harus gigit jari karena gagal menyaksikan duel langsung Lionel Messi melawan Cristiano Ronaldo, dua megabintang Barcelona dan Real Madrid yang persaingan diantara keduanya selalu menjadi bualn bibir di kalangan penikmat sepak bola. Sekiranya, Argentina mengalahkan Prancis dan Portugal mengkandaskan perlawanan Uruguay, Argentina akan bersua Portugal di babak perempat final. Selama ini, kedua pemain hanya terlibat persaingan di level klub. Peluang bagi mereka untuk bertemu dan saling bertarung saat berseragam tim nasional di kompetisi Piala Dunia mungkin sudah tertutup. Di Piala Dunia berikutnya pada tahun 2022, Ronaldo akan berusia 37 tahun dan Messi 35 tahun. Usia yang tentunya sangat jauh dari kata ideal untuk bisa tampil prima di kancah tertinggi sepakbola sejagat raya itu.

Peluang Datangnya Juara Baru

Meski ditinggal tim-tim tangguh tadi, Piala Dunia kali ini masih menyisakan tim-tim kuat yang pernah mengecap gelar juara di piala dunia edisi-edisi sebelumnya seperti Prancis, Brazil, Inggris dan Uruguay plus dua tim kuda hitam Kroasia dan Belgia. Di enam negara ini terdapat nanana-nama beken seperti Kylian Mbappe, Antoine Grizmann (Prancis), Neymar, Coutinho (Brazil), Harry Kane (Inggris), Luiz Suarez, Edinson Cavani, Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic (Kroasia), Eden Hazard, Dries Mertens dan Romelu Lukaku (Belgia).

Piala Dunia kali ini juga membuka kemungkinan lahirnya juara baru. Publik mungkin akan sepakat bahwa jika juara baru harus lahir, maka dua tim kuda hitam Kroasia dan Belgia lah yang pantas mendapatkannya. Pasalnya, secara penampilan, baik Kroasia maupun Belgia sama-sama menunjukkan permainan yang sangat menjanjikan. Bahkan, jika melihat bagan fase gugur, Kroasia dan Belgia memiliki peluang untuk bertemu di babak final. Tentunya bukan langkah yang mudah bagi kedua tim asal benua Eropa ini untuk mampu meraih trofi tertinggi kompetisi empat tahunan itu.

Dimulai dari Kroasia, tim berjuluk *The Blazer* ini akan berhadapan dengan tuan rumah Rusia. Secara materi pemain, kualitas tim Rusia memang masih di bawah Kroasia. Akan tetapi faktor tuan rumah menjadi modal penting bagi Artem Dzyuba dan kawan-kawan. Dukungan supporter dan permainan pragmatis namun dengan kedisiplinan tinggi telah berhasil mengantarkan Rusia ke babak perempat final setelah menyingkirkan Spanyol lewat adu tendangan dua belas pas.

(Bersambung ke hal. 27)

Antara Hubungan Kebijakan dan Kebutuhan Masyarakat

Oleh: Muhammad Syukri Albani Nasution

Banyak ramalan panjang tentang masa depan perpolitikan bangsa ini. Dan ke simpulan ramalan panjang tersebut mengarah pada apatisme masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah, legislative dan yudikatif di bangsa ini. Akankah ada kebijakan pemerintah yang sangat bergantung pada kebutuhan rakyat dan akhirnya menjadi media harmonisasi antara pemerintah dan rakyatnya.

Realitas Sosial dan Hukum

Indonesia adalah Negara hukum yang beraliran positivisme. Ketika sebuah kebijakan dianggap layak dan sah jika didukung oleh kebijkan pemerintah dan disalkan secara yuridis dalam bentuk aturan-aturan dan keputusan-keputusan. Kelebihan dari system positivisme ini tentunya dari pelegalan hukumnya, hukum menjadi wilayah yang terkuat dalam bernegara. Ketika sudah ada aturan hukumnya, maka tidak akan ada lagi celah untuk menggugatnya.

Namun, kelemahannya juga bisa menjadi ruang kesenjangan antara pemerintah dan rakyat. Ukuran keadilan di negara yang beraliran positivisme adalah hukum yang legal. Dan tidak ada ukuran lainnya. Oleh karenanya, kekakuan ukuran ini yang menjadikan setiap kebijakan yang diambil hanya untuk "menyelamatkan Negara "bukan menyelamatkan rakyat dengan segala kebutuhannya. Hal inilah yang menjadi dilematis dalam perjalanan bangsa yang beraliran postivisme ini.

Ketika berbicara tentang realitas social, Prof Zainuddin Ali dalam istilah sosiologi hukum memberi ketegasan bahwa didalam perubahan hukum terkait di dalamnya dengan perubahan social yang memiliki kekuatan secara utuh. Sebab, ukuran keadilan dalam sebuah Negara adalah rakyat yang tertuang dalam undang-undang, aturan dan kebijakan yang sah dan legal secara hukum. Inilah yang menjadi ruang bagi pemerintah untuk terus menganalisis setiap kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

Akhirnya, keinginan untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah menjadi lebih sulit, sebab pemerintah kali ini lebih sering mengambil kebijakan " yang tidak populer " bagi masyarakat.

Sementara masyarakat sangat sederhana dalam menilai pemerintah, yaitu pemerintah yang membuat rakyat aman, nyaman, sejahtera dan tidak terbebani dengan berbagai kebijakan yang lahir.

Sebenarnya, tingkat stabilitas kehidupan masyarakat Indonesia masih sangat kecil. Masyarakat Indonesia masih butuh waktu yang cukup lama untuk menstabilkan dan menetralisir keadaan perekonomian keluarganya jika ada kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian dan harga. Hal inilah yang akhirnya membuat rakyat gelisah atas kebijakan-kebijakan yang lahir.

Analisa sederhana penulis, bagaimana jika sesekali dalam melahirkan kebijakan yang dianggap tidak populer itu pemerintah secara akumulatif, dalam hal ini legislatif sebagai perwakilan sehurah rakyat Indonesia, eksekutive baik daerah maupun pusat bekerja sama menanggulanagi masalah-masalah yang ada agar masalah tersebut tidak lagi sampai menyentuh masyarakat sampai kelas bawah.

Atau dibuat kebijakan yang hanya berkaitan kepada masyarakat industri, pengusaha, pejabat dan yang dianggap berkompeten dengan itu. Ini juga demi melindungi masyarakat bawah yang dalam hidupnya mungkin sudah didominasi oleh kesusahan. Tapi, sayangnya setiap kebijakan yang sensitif ini selalu saja " atas nama rakyat". Namun ketika berbicara tentang anggaran kesejahteraan pejabat, legislatif, yudikatif selalu saja kebutuhan " atas nama rakyat " ternafikan dan terduakan oleh kepentingan-kepentingan golongan itu.

Rakyat dan Pemerintah yang Setengah Hati

"Sesekali berikanlah kesenangan bagi rakyat dengan tidak lagi memikul beban berat itu."

Kalimat sederhana di atas mungkin bisa mewakili para pejabat di Indonesia ini untuk mengingat kembali "janji politiknya" ketika berusaha merayu dan menganbil hati rakyat. Kalimat "tidak menaikkan harga BBM, sembako dan memprioritaskan kesejahteraan rakyat" adalah kalimat yang "laris manis" di panggung politik sebelum terpilih menjadi pejabat, baik di daerah maupun pusat.

Akhirnya, janji-janji politik itu adalah hutang secara lahir maupun bathin yang harus diterapkan dengan sepenuh hati. Oleh karenanya, pemerintah juga dalam hal ini harus disegarkan kembali dengan tugas dan wewenangnya untuk dan demi kesejahteraan rakyat. Jangan sampai ada pemerintahan " setengah hati " yang berkalkulasi dalam menimpin bangsa ini. Jangan sampai dosa politik membelit diri hingga memperlebar luka ke pesimisan rakyat atas kinerja pemerintah.

Andai saja pemerintah menjadi khadimul umat (pelayan masyarakat) bagi rakyatnya, mungkin akan banyak pertimbangan lain untuk tidak mengecewakan rakyat atas kebijakan yang lahir.

Atau sesekali pemerintah bisa melahirkan kebijakan yang membuat rakyat Indonesia tersenyum dalam kekakuan raut wajahnya selama ini. Misalnya pemerintah memberikan subsidi BBM atau sembako gratis bagi semua rakyat Indonesia tanpa kelas dan status. Tanpa saat birokrasi dan administrasi yang berbelit dan sebagainya. Mungkin itu bisa menjadi pengobat luka hati dalam kepenatan hidup selama ini.

Jika terus berandai, maka banyak hal yang menjadi keinginan rakyat yang sampai hari ini masih sekedar mimpi saja. Pada akhirnya hal ini berakibat pada tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang sudah mulai menipis. Lihat saja pilkada di berbagai daerah yang tidak lebih dari 50 % rakyat ssaja yang mau memilih. Hal ini tentunya menjadi indikasi bahwa kepatisan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sudah tidak dapat disembunyikan lagi.

(Bersambung ke hal. 27)

Balikpapan Melarang Kantong Plastik, Medan Kapan?

HAMPIR di seluruh penjuru Eropa dan Amerika penggunaan plastik ditekan serendah mungkin, bahkan di negara Eropa, setiap orang yg mengembalikan botol plastik cola cola dan minuman ringan lainnya ke supermarket akan mendapat gimmick berupa voucher potongan belanja.

Makanya tidak mengherankan masyarakat yang akan belanja ke supermarket selalu membawa botol plastik kosong utk ditukarkan voucher belanja. Bila belanja dan meminta kantong plastik maka kita wajib membelinya, tidak ada kantong plastik gratis!

Negara di Asia adalah pengguna plastik terbesar dan paling boros. Tulisan dari salah seorang pembaca Harian *Analisa* yang mengingatkan Pemko menerbitkan SK pelarangan mungkin tidak begitu diperhatikan pemerintah.

Jangankan menerbitkan SK pelarangan kantong plastik, jalan yang berlubang saja tak ada inisiatif menutupnya. Trotoar yang *kupak kapik* saja tak ada niat untuk memperbaiki, apalagi masalah remeh temeh kayak kantong plastik.

Meminjam istilah kaum remaja," *emang gue pikirin*". Solusi terbaik dan mudah utk mengugah masyarakat memulai membawa tas sendiri saat belanja adalah mulailah dari komunitas.

Saat ini banyak sekali komunitas di masyarakat. Misalnya komunitas sepeda, komunitas vespa, komunitas *night run*, komunitas ibu arisan dsb. Komunitas kecil ini biasanya sangat kompak dan rata rata terdiri dari orang yang berpendidikan dan mudah diajak berbuat kebaikan.

Selain itu bisa juga dari pihak penyelenggara acara, sebisa mungkin memberi gimmick berupa tas belanja yang dibuat menarik sehingga masyarakat termotivasi memakai tas cantik untuk belanja. Pihak supermarket besar semisal Berastagi Supermarket, Hypermart, Transmart dsb tentunya bisa membuat tas belanja yang cantik dan menarik (istilahnya yang *eye catching*) sehingga pelanggan bangga menggunakannya.

Intervensi lainnya adalah dari sekolah, kenalkan anak sekolah dengan tas belanja non plastik, anak-anak adalah sosok yang jujur dan paling mudah diajak berbuat perubahan. Anak-anak bisa menjadi role model di dalam keluarganya ,makanya di Jepang, sekolah-sekolah mengajarkan kebersihan lingkungan dan *go green*.

Masyarakat luas tidak sama taraf pendidikannya dan keperduliannya, makanya susah memotivasi mereka untuk *say no to plastic*. Masyarakat yang berpendidikan tinggi sekalipun belum tentu tergugah krn prinsip mereka "buat apa repot kalau sudah ada yang nyediain kantong plastik". Mengubah *mindset* itu susah, mereka harus ada role model dan penalty untuk berubah.

Demikianlah tanggapan kami, semoga bermanfaat.

HARTONO TASLIM
Jl. Listrik 6 Medan 20122

Surat Pembaca

***SURAT PEMBACA** melayani keluhan-keluhan pembaca seputar layanan publik, tidak berunsur SARA. Kirimkan ke redaksi Analisa Jalan Jend. A. Yani No. 35-49 Medan, atau online@analisadaily.com, fak (061) 451-4031. Surat diketik antara setengah sampai satu folio hendaknya dilengkapi alamat, fotokopi KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku dan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi. Redaksi berhak mengedit atau tidak memuat Surat Pembaca yang tidak memenuhi kriteria Analisa.* **(redaksi)**